

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

DITERBITKAN OLEH:
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANDUNG (BPPKI)
BADAN LITBANG SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

Topik Utama

- 1 Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedan Editorial Media Indonesia di Metro TV
Lucy Pujasari Supratman
- 11 Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media dalam Keterbukaan Informasi
Sapta Sari
- 27 Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi
C.Suprpti Dwi Takariani
- 41 PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat
Syarif Budhirianto
- 51 Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis *Web* di Era Keterbukaan
Nana Suryana
- 59 Manajemen Informasi suatu Alternatif Ditinjau dari Perspektif Teori Efek Komunikasi Massa
Sri Wahyuningsih

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

MAKNA KETERBUKAAN INFORMASI DI RUANG PUBLIK PADA PROGRAM BEDAH EDITORIAL MEDIA INDONESIA DI METRO TV

Lucy Pujasari Supratman

DISCLOSURE OF INFORMATION MEANING IN THE PUBLIC AT PROGRAM BEDAH EDITORIAL MEDIA INDONESIA IN METRO TV

Abstract

Editorial is the attitude of a mass media on one phenomenon or emerging discourse in society. In generally, the format of each editorial is in its own media private right. It contains of arguments that based on single truth from the mass media. Unlike Editorial Media Indonesia, it has a breakthrough visualizing its editorial to public sphere in television program. It is called Bedah Editorial Media Indonesia which 'totally' elaborate the content of editorial by opening interactive dialogue segment as the representation of the openness information era. Bedah Editorial Media Indonesia program carries assertive, straight forward and honest in delivering their voices based on interactive grand theory. It proposes neutrality in critical action by voicing the truth, especially national ideology, Pancasila (five basic principles of the Republic of Indonesia), four pillars of the nation and democratic values to the audiences.

Keywords: *private rights, public sphere, Bedah Editorial Media Indonesia television program*

Abstrak

Editorial merupakan sikap dari sebuah media massa pada peristiwa atau wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Format setiap

editorial pada umumnya bersifat hak privat, berisi pendapat berdasarkan argumen-argumen yang merupakan sebuah kebenaran tunggal dari media massa tersebut. Berbeda halnya dengan Editorial Media Indonesia yang meneropong pada terobosan lain melalui visualiasi tajuk rencananya ke ruang publik televisi. Program yang diangkat ke layar kaca ini bernama Bedah Editorial Media Indonesia, pada akhirnya 'benar-benar' membedah konten editorial koran dengan membuka segmen dialog interaktif sebagai representasi dari era keterbukaan informasi. Program Bedah Editorial Media Indonesia yang mengusung tegas, lugas, dan jujur bersuara ini dalam dialog interaktifnya selalu berbasiskan grand teori dengan mengusung kenetralan dalam bersikap kritis dengan menyuarakan yang sebenarnya terutama ideologi tentang kebangsaan, pancasila, empat pilar bangsa, serta nilai-nilai demokrasi pada khalayak luas.

Kata kunci: hak privat, ruang publik, program Bedah Editorial Media Indonesia

MENEROPONG PRODUKSI MEDIA DAN IDEALISME MEDIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI

Sapta Sari

MEDIA PRODUCTION AND IDEALISM MEDIA Telescoped IN INFORMATION DISCLOSURE

Abstract

The mass media have a duty and obligation which is very important for society. The main task of journalism is to convey the truth.

KUMPULAN ABSTRAK

Delivering the truth is not an easy job, because there are factors that become an obstacle for example the interests media managers. Disclosure of the information is supported by the development of technology makes media managers compete to present information for the public. Media management is not just talk how to travel media itself since the conventional to the current interactive media, how media can carry out their duties as a theoretical perspective represented in the media, such as what is generated media production, how to media managers take advantage the disclosure of information in media production, as well as how the media itself a form of responsibility to the society associated with the production they produce.

Keywords: media production, media idealism, disclosure of information.

Abstrak

Media massa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat. Tugas utama dari jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tersebut bukan pekerjaan mudah, karena ada faktor yang menjadi penghambat misalnya berbentur dengan kepentingan pengelola media. Keterbukaan informasi yang didukung dengan perkembangan teknologi membuat pengelola media berlomba menyajikan informasi untuk masyarakat. Pengelolaan media tidak saja berbicara bagaimana perjalanan media massa itu sendiri sejak era konvensional sampai media interaktif saat ini, bagaimana media bisa menjalankan tugasnya seperti yang tergambarkan dalam perspektif teoritis media, seperti apa produksi media yang dihasilkan, bagaimana pengelola media memanfaatkan keterbukaan informasi dalam produksi medianya, serta bagaimana bentuk tanggungjawab media itu sendiri kepada masyarakat berkaitan dengan produksi yang mereka hasilkan kepada masyarakat.

Kata kunci: produksi media, idealisme media, keterbukaan informasi.

PENGELOLAAN INFORMASI OLEH BADAN PUBLIK PEMERINTAH PASKA REFORMASI BIROKRASI

C.Suprpti Dwi Takariani

INFORMATION MANAGEMENT BY THE PUBLIC GOVERNMENT AFTER BUREAUCRACY REFORM

Abstract

Reform of the bureaucracy was born as a form of various side desire to create a government that is clean and transparent or good governance. The consequence is the need for openness in providing information that needed by the public. Because of the public or the people has the right to obtain information and the rights guaranteed by the law. To achieve this goal it is necessary to manage the information to be easily access by the public or the people. By utilizing the development of communication and information technology. Public agency could build an information systems ICT-based, but until now not all public bodies has implement them. Lack of infrastructure and human resources in the field of ICT be obstacles.

Keywords: information management, Public Government, bureaucracy reform..

Abstrak

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

KUMPULAN ABSTRAK

masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik melaksanakannya. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK menjadi kendalanya.

Kata kunci: pengelolaan informasi, Badan Publik, reformasi birokrasi.

PPID DAN TRANSFER INFORMASI DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Syarif Budhirianto

PPID TRANSFER INFORMATION AND PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN PERSPECTIVE IN WEST JAVA

Abstract

In building the PPID imaging in West Java Provincial Government as a means of information transfer towards a transparent and accountable government, public institutions need to be built user friendly that understands the needs of their communities, and can be easily accessed by the public . The relationship can be built with the education and training of human resources in the field of information and communication technology (ICT) as an agent of the provider, management , and dissemination of public information , so the faster realization of information management in facilitating the government to encourage the active participation of the community . Public interest is not limited to budget accountability

system , but in a broader perspective that can improve the quality of life . Community participation should be placed on the main role in any development that is in contact with the public interest . Administration . Jabar very open to people's aspirations and provide the widest possible space for it , but participation was not optimal when used only by certain segments of society.

Keywords: *PPID West Java Provincial Government, the transfer of information, public participation.*

Abstrak

Dalam membangun pencitraan PPID di Pemerintah Provinsi Jabar sebagai alat transfer informasi menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel, perlu dibangun institusi publik yang *user friendly* yang memahami kebutuhan masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai agen penyedia, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik, sehingga terwujudnya informasi yang lebih cepat dalam memfasilitasi manajemen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kepentingan masyarakat tidak terbatas pada sistem pertanggungjawaban anggaran saja, tetapi dalam perspektif yang lebih luas lagi yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat harus ditempatkan pada peran yang utama dalam setiap pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Pemprov Jabar sangat terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk hal tersebut, namun partisipasi itu tidaklah optimal bila dimanfaatkan hanya oleh segmen masyarakat tertentu saja.

Kata kunci: PPID Pemerintah Provinsi Jabar, transfer informasi, partisipasi masyarakat.

KUMPULAN ABSTRAK

SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK BERBASIS *WEB* DI ERA KETERBUKAAN

Nana Suryana

SYSTEM INFORMATION CAMPAIGN FUND POLITICAL PARTIES WEB BASED IN THE ERA OF TRANSPARENCY

Abstract

Management of campaign finance in legislative elections before a lot of attention , because it felt covered up , patgulipat , not objective and not reported truthfully or not transparent . So to not happen again , at step 2014 legislative elections anticipated by implementing information systems web -based campaign finance or Campaign Fund Web - Based Information System (CFISWB) . Performance of this system is very effective , such as data processing (revenues and expenditures) start campaign funds of storage / archiving , and analyzing the publication can be done in an objective , open and very wide range pempublikasiannya . CFISWB application so that the support of the leadership of political parties , and many contributions to worthy utilized , in favor of honesty , objectivity and transparency . Supervision was easily done by anyone . Can then close opportunities , avoid suspicious transactions and detect all the illegal funds (funds deposit , investment , loan) are entered.

Keywords: *information system, web-based and transparency.*

Abstrak

Pengelolaan dana kampanye pada pemilu legislatif sebelumnya banyak sorotan, karena kesannya ditutup-tutupi, tidak objektif, dan tidak dilaporkan sejujurnya atau tidak transparan. Untuk tidak terulang lagi, pada

pemilu legislatif 2014 langkah antisipasinya dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *Campaign Fund Information System Web-Based* (CFISWB). Kinerja sistem ini sangat efektif, seperti proses pengolahan data (penerimaan dan pengeluaran) dana kampanye mulai dari penyimpanan/pengarsipan, penganalisisan, dan pempublikasian dapat dilakukan secara objektif, terbuka dan jangkauan pempublikasiannya sangat luas. Sehingga penerapan CFISWB yang mendapat dukungan dari pimpinan Parpol, layak dimanfaatkan dan banyak kontribusinya, dalam mendukung kejujuran, keobjektifan dan keterbukaan. Pengawasan pun mudah dilakukan oleh siapa saja. Kemudian dapat menutup peluang, menghindari transaksi mencurigakan dan mendeteksi segala dana ilegal (dana titipan, investasi, pinjaman) yang masuk.

Kata kunci: sistem informasi, berbasis *web* dan keterbukaan.

MANAGEMEN INFORMASI SUATU ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI EFEK KOMUNIKASI MASSA

Sri Wahyuningsih

INFORMATION MANAGEMENT BASED ON AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE THEORY OF MASS COMMUNICATION EFFECTS

Abstract

The television media has the main function to educate, entertain, influence. This function is a reference by the media actors and producers to compete to attract audiences in selecting channel programs presented on television. A growing number of local television and private television became intense competition in the media industry. It is very motivating players and media producers to get creative in the

KUMPULAN ABSTRAK

making of television programs for children up to adult movies, soap operas, talk shows, infotainment, and other programs, but it is a pity they do not pay attention to media management that the existing rules the KPI, P3SPSS, LSF, as well as segmentation, time, method of presentation and duration. Ideology market like this is happening in the State of Indonesia. So the shows that are presented do not rule out the possibility to have a negative effect on the audience. Analysis of the underlying theory is the theory of mass communication effects of stimulus response, agenda setting, and the theory of catharis.

Keywords: *television, information, ideology market, theories of Mass Communication Effects*

Abstrak

Media televisi mempunyai fungsi utama mendidik, menghibur, memengaruhi. Fungsi inilah yang menjadi acuan oleh para pelaku media dan para produser untuk berlomba-

lomba menarik khalayak dalam memilih *channel* program acara yang disajikan di televisi. Semakin banyak televisi lokal dan televisi swasta menjadi persaingan yang ketat dalam industri media. Hal ini sangat memotivasi para pelaku media dan para produser untuk semakin kreatif dalam membuat program acara di televisi dari film untuk anak hingga dewasa, sinetron, *talk show*, *infotainment*, dan program acara lainnya, tetapi yang disayangkan mereka tidak memerhatikan manajemen medianya yaitu aturan yang ada dalam KPI, P3SPSS, LSF, begitu pula dengan segmentasi, waktu, metode penyajiannya dan durasinya. Idiologi pasar seperti ini yang terjadi pada negara Indonesia. Sehingga tayangan-tayangan yang disajikan tidak menutup kemungkinan mempunyai efek negatif untuk khalayaknya. Analisis teori yang melandasinya adalah teori Efek Komunikasi Massa, *Stimulus Respon*, *Agenda Setting*, dan teori Kataris.

Kata Kunci: televisi, informasi, idiologi pasar, teori Efek Komunikasi Massa.

PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

Era reformasi yang telah di gulirkan beberapa waktu yang lalu, telah mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh informasi. Informasi merupakan hak pokok setiap orang baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Pada masyarakat modern, kebutuhan akan informasi semakin mendesak dan semakin penting.

Cartwright et al.(2001) mengatakan, dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas tersebut bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, di mana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima, dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum manusia, dan menggunakannya sebagai sarana penambah pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dengan mudah bisa didapatkan dan hadir menyapa kita setiap saat. Meskipun perkembangan teknologi telah memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, namun masih ada beberapa informasi yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan ranah publik. Keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi momen penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknyalah Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Observasi edisi Juni 2014, menyajikan beberapa tulisan dengan tema “Pengelolaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi” yang berisikan berbagai pandangan tentang bagaimana media massa dan juga Badan Publik mengelola informasi agar bisa dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Ada sedikit perubahan dalam Observasi edisi kali ini yang hanya berisi 6 (naskah) dan perubahan pada halaman judul.

SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK BERBASIS *WEB* DI ERA KETERBUKAAN

Nana Suryana

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung

Jl. Pajajaran No. 88 Bandung – 40173, Jawa Barat, telp.022-6017493

e-mail: nanas_bdg@yahoo.co.id HP. 081 220308326

Naskah dikirim tanggal 25 April 2014, disetujui 30 Mei 2014

SYSTEM INFORMATION CAMPAIGN FUND POLITICAL PARTIES WEB BASED IN THE ERA OF TRANSPARENCY

Abstract

Management of campaign finance in legislative elections before a lot of attention, because it felt covered up, not objective and not reported truthfully or not transparent. So to not happen again, at step 2014 legislative elections anticipated by implementing information systems web-based campaign finance or Campaign Fund Web-Based Information System (CFISWB). Performance of this system is very effective, such as data processing (revenues and expenditures) start campaign funds of storage/archiving, and analyzing the publication can be done in an objective, open and very wide range. CFISWB application so that the support of the leadership of political parties, and many contributions to worthy utilized, in favor of honesty, objectivity, and transparency . Supervision was easily done by anyone. Can then close opportunities, avoid suspicious transactions and detect all the illegal funds (funds deposit , investment, loan) are entered.

Keywords: information system, web-based, and transparency.

Abstrak

Pengelolaan dana kampanye pada pemilu legislatif sebelumnya banyak sorotan, karena kesannya ditutup-tutupi, tidak objektif, dan tidak dilaporkan sejujurnya atau tidak transparan. Untuk tidak terulang lagi, pada pemilu legislatif 2014 langkah antisipasinya dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *Campaign Fund Information System Web-Based* (CFISWB). Kinerja sistem ini sangat efektif, seperti proses pengolahan data (penerimaan dan pengeluaran) dana kampanye mulai dari penyimpanan/pengarsipan, penganalisisan, dan pemublikasian dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan jangkauan pemublikasiannya sangat luas. Sehingga penerapan CFISWB yang mendapat dukungan dari pimpinan Parpol, layak dimanfaatkan dan banyak kontribusinya, dalam mendukung kejujuran, keobjektifan, dan keterbukaan. Pengawasan

pun mudah dilakukan oleh siapa saja. Kemudian dapat menutup peluang, menghindari transaksi mencurigakan dan mendeteksi segala dana ilegal (dana titipan, investasi, pinjaman) yang masuk.

Kata kunci: sistem informasi, berbasis *web*, dan keterbukaan.

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dinamika sosial semakin tinggi menempatkan informasi menjadi salah satu kebutuhan yang *urgent*. Dengan memperoleh banyak informasi akan menambah pengetahuan/wawasan dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Itulah sebabnya, informasi banyak dicari dan pengaruhnya tidak sedikit bermunculan industri-industri yang bergerak di bidang media informasi, seperti industri atau perusahaan surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media lainnya.

Memasuki masa kampanye Pemilu Legislatif 2014, informasi sekitar pemilu ini, terutama informasi tentang dana kampanye Partai Politik (Parpol) menarik perhatian dan banyak sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Mengingat dana tersebut walaupun dilaporkan ke KPU, tapi masih memiliki indikasi ketidakobjektifan, ketidakterbukaan, dan ketidakjujuran. Baik sumber dan besaran penerimaan maupun pengeluaran untuk semua kegiatan politik sebelum dan selama masa kampanye, yaitu dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2014 (masa kampanye pemilu legislatif).

Untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku dan demi ketertiban administratif semua (12) Parpol peserta pemilu sudah melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2014. Namun yang dilaporkan

berupa besaran dan sumber dana kampanye secara total. Dengan demikian biaya politik untuk dana kampanye itu tidak melebihi biaya sebagaimana dilaporkan.

Untuk wilayah Jawa Barat, dana kampanye seluruh (12) Parpol peserta pemilu 2014, secara total jumlahnya mencapai lebih dari Rp85 miliar. Dari jumlah tersebut paling besar adalah dana kampanye Partai Gerindra sebesar Rp22 miliar lebih. Dana ini semuanya berasal dari sumbangan calegnya saja, belum ada sumbangan dari perorangan bukan anggota, badan usaha maupun kelompok. Sementara dana kampanye paling kecil adalah PKPI, yaitu hanya sebesar Rp 1 miliar lebih, ini juga hasil sumbangan dari para calegnya (Galamedia, 5/3-2014).

Meskipun sudah jelas besaran dana kampanye Parpol seperti laporan terungkap di atas, tapi masih ada indikasi atau ada kemungkinan dalam realisasinya akan jauh lebih besar. Sebab biaya kampanye biasanya memakan biaya yang sangat besar dan banyak pos-pos anggaran jauh dari yang diprediksi.

Kalaulah demikian tidak menampik bahwa dana kampanye rawan penyelewengan, manipulasi serta jauh dari kejujuran dan keterbukaan. Padahal informasi dana kampanye (penerimaan dan pengeluaran) Parpol ini sangat dibutuhkan dan wajib diketahui oleh masyarakat, agar terlihat kejujuran dan keterbukaannya. Sebetulnya pengelolaan dana kampanye apapun metodenya

mudah untuk dilaksanakan, objektif dan transparan, jika didukung dengan kemauan politik (*political will*) dari Parpol itu sendiri serta ditunjang dengan menerapkan sistem informasi. Sistem informasi itu merupakan pekerjaan kolektif yang memerlukan kebersamaan masing-masing subsistem.

Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (institusi pemerintah). Bisa juga dikatakan bahwa, mekanisme kerja sebuah sistem informasi adalah mengumpulkan, memroses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi memproses *input* (data, instruksi) dan menghasilkan *output* (laporan, kalkulasi) yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang lainnya (Sutarman, 2009).

Sehingga dengan menerapkan mekanisme kerja sistem informasi bisa diduga laporan dana kampanye tidak akan gegabah dan tidak akan asal-asalan atau tidak sembarangan. Sebab dalam mengolah datanya ditunjang dengan masing-masing subsistem berfungsi secara baik dan objektif. Seperti subsistem (teknologi informasi), yaitu komputer dan internet yang lebih dioptimalkan. Mengingat kedua jenis infrastruktur teknologi informasi ini banyak sekali kontribusinya dalam mengolah dan menganalisis data (dana kampanye) hingga menjadi informasi yang siap dipublikasikan.

Dengan memanfaatkan internet/*web*, sistem informasi dana kampanye Parpol berbasis *web* selain kinerjanya sangat cepat dan akurat juga sangat menunjang sekali dalam memperlihatkan kejujuran dan keterbukaan. Kemudian pengawasan pun

mudah dilakukan dan lebih efektif, sehingga bisa menentukan Parpol mana yang betul-betul jujur dan terbuka (transparan), dan yang tidak. Selain itu bisa memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan berani mengkritisi dan atau mengapresiasi sistem informasi dana kampanye Parpol berbasis *web* ini, sebagai media pembelajaran politik.

Untuk mewujudkan era keterbukaan sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut Budianto, Undang-Undang KIP mempunyai tiga sumber utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi menyangkut keterbukaan informasi pada badan publik untuk dapat diakses masyarakat. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan/keputusan pemerintah. Akuntabilitas publik menunjukkan dorongan bagi badan-badan publik untuk bertanggungjawab kepada publik atas program/kebijakan yang dilaksanakan (Budianto, 2011).

Parpol sebagai badan publik non pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi dana keuangan Parpol, wajib diinformasikan karena dana ini bersumber dari dana masyarakat melalui APBN/APBD. Sementara dana kampanye diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang teknisnya berpedoman pada PKPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye. Sehingga penerimaan dan pengeluaran dana kampanye menjadi lebih terbuka.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa penerapan sistem informasi dana kampanye Parpol berbasis *web* sangat menunjang keterbukaan dan kejujuran.

Artinya selain akan diketahui sumber dan besaran penerimaan dan pengeluaran juga peruntukannya akan lebih objektif dan terbuka. Sehingga berbagai jenis kegiatan kampanye lengkap dengan perincian biaya/dananya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Apabila semua ini, termasuk UU KIP dapat dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan citra, kepercayaan, popularitas, dan elektabilitas Parpol.

Sistem Informasi

Secara harfiah sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “informasi”. Definisi “sistem” adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud (Sumantri, 1976).

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh masing-masing subsistem yang dapat berfungsi dengan baik. Karena antara satu subsistem dengan subsistem lainnya saling melengkapi. Sehingga subsistem perlu dipelihara dan diberdayakan seoptimal mungkin, terhindar dari kerusakan atau gangguan. Dengan adanya kelalaian dan gangguan dalam pemeliharaan bisa menyebabkan subsistem rusak, ini bisa berakibat fatal terhadap maksud dan tujuan yang akan dicapai melalui sistem tersebut tidak akan terpenuhi dengan sempurna.

Kemudian untuk definisi “informasi” sebagaimana tertera dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 UU No. 14/2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Dengan demikian informasi merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang banyak dicari, seperti informasi tentang fungsi dan dana Parpol peserta pemilu 2014. Parpol memiliki sepuluh fungsi, tapi kenyataannya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kesepuluh fungsi tersebut. Akibatnya tidak sedikit anggota masyarakat yang kurang mengapresiasi keberadaan, peran, dan fungsi Parpol. Mereka baru mengetahui keberadaan Parpol jika akan ada pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada. Demikian halnya dengan dana Parpol, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui asal usul dan penggunaan dana tersebut.

Di sini terlihat antara sistem dan informasi memang memiliki pengertian sendiri-sendiri, memiliki keterkaitan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Maka begitu disatukan menjadi sistem informasi, artinya menjadi kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (institusi pemerintah). Bisa juga dikatakan bahwa, mekanisme kerja sebuah sistem informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi memproses input (data, instruksi) dan menghasilkan *output* (laporan, kalkulasi) yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang lainnya (Sutarman, 2009).

Meskipun mekanisme kerja sistem informasi terlihat sudah efektif dan produktif, namun masih ada yang menganggap untuk berhasilnya sistem informasi itu lebih bergantung beberapa aspek saja. Cook dalam Tejoyuwono,

mengatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi yang diatur berdasarkan maksud perbuatannya bergantung pada tiga faktor utama, yaitu (1) keserasian dan mutu data; (2) pengorganisasian data; dan (3) tatacara penggunaannya (Tejoyuwono, 1990).

Sistem Informasi Berbasis *Web*

Komputer dan Internet merupakan bagian dari teknologi informasi sekaligus merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Sekarang komputer dan internet banyak dimanfaatkan institusi pemerintah, lembaga swasta maupun individu dalam masyarakat, mekanisme kerja sistem informasi dapat mengoptimalkan komputer dan internet. Alasannya mekanisme kerja secara *computerize* dapat menjamin kinerjanya lebih produktif dan efektif, *output* (informasi)nya dijamin berkualitas dan *out comenya* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Mengingat penginformasiannya melalui internet/*web*, maka sistem informasi seperti ini lebih tepat dikatakan sebagai sistem informasi berbasis *web*.

Demikian halnya dalam penginformasian dana kampanye Parpol melalui internet akan lebih efektif, meluas dan memperlihatkan keterbukaan, karena jangkauan pengakses/pembacanya sangat meluas dan dapat diakses/dibaca oleh siapa dan di mana saja, tidak terkendala oleh letak geografis.

Di era keterbukaan, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan TIK, terutama dana kampanye Parpol sudah waktunya dikelola secara komputerisasi dan dipublikasikan melalui internet/*web*.

Meskipun dapat dipastikan bahwa pengelolaan dana kampanye melalui *Information System Web-Based* (ISWB) secara managerialistik sangat bagus dan efektif, namun bukan merupakan hal yang mutlak, sebab masih ada juga yang harus menjadi bahan pertimbangan, yaitu kemauan politik (*political will*) dari masing-masing Parpol itu sendiri.

Pembahasan

Melihat hasil evaluasi bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif sebelumnya, dana kampanye masih menjadi sorotan, pertanyaan dan perdebatan di berbagai lembaga/kalangan masyarakat, seperti pengamat politik, kalangan akademisi, dan lain-lain, karena sepertinya tidak dilaporkan kepada KPU secara objektif, jujur, dan terbuka (transparan). Tidak jelas alasannya, tapi yang bisa dipastikan di antaranya adalah tidak ada kemauan politik (*political will*) dari Parpol peserta pemilu untuk melaporkannya secara objektif, jujur, dan terbuka. Belum lagi pengelolaannya masih bersifat konvensional. Sehingga dengan demikian tidak mustahil aliran (keluar masuknya) dana kampanye itu banyak yang ditutup-tutupi dan banyak transaksi yang mencurigakan.

Padahal payung hukumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, namun dalam implementasinya sangat memprihatinkan jauh dari optimal, seperti tidak ada pembatasan sumber dana perseorangan anggota Parpol. Undang-undang ini hanya mengatur pembatasan sumber dana perseorangan bukan anggota Parpol dan perusahaan atau badan usaha. Dengan adanya ketentuan seperti ini, tidak heran

jika banyak dimanfaatkan oleh perorangan bukan anggota, perusahaan, badan usaha atau siapa saja untuk memberikan sumbangan tersebut melalui anggota Parpol.

Besarnya dana kampanye yang terkumpul bukan hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Mulai dari yang legal berasal dari kas Parpol, iuran anggota, iuran non anggota dan perusahaan tapi sesuai aturan yang berlaku. Kemudian tidak sedikit yang ilegal seperti disebut dana gelap, dana investasi, dana titipan, dana pinjaman dan dana apa saja yang masuk dan menjadi modal kampanye.

Berangkat dari gambaran di atas, maka pengelolaan dana kampanye pada pemilu legislatif 2014, jika dilakukan secara manual/konvensional tampaknya akan mengalami banyak kesulitan dan berindikasi banyak transaksi yang mencurigakan. Ada dugaan banyak peluang dan tidak mustahil pengurusan dana kampanye pemilu legislatif sebelumnya yang diindikasikan banyak kecurangan itu terulang lagi bahkan bisa melebihi baik kualitas maupun kuantitasnya. Artinya dana kampanye pemilu legislatif 2014 yang terpakai tidak semuanya bersih atau halal, tapi tidak sedikit terselip pesanan atau titipan dari penyumbang gelap/ilegal, atau semacam kontrak politik ilegal.

Dengan pemanfaatan dana kampanye seperti di atas sangat memprihatinkan, karena sedikitnya dapat berpengaruh terhadap kinerja caleg jika nanti terpilih menjadi anggota parlemen atau wakil rakyat. Ada indikasi kinerjanya tidak akan maksimal, bahkan mengecewakan masyarakat, khususnya konstituennya.

Itulah sebabnya anggota dewan (wakil rakyat) lebih mengutamakan pengembalian modal dan atau membayar utang dulu ketimbang melaksanakan tugas-tugas dewan sesuai aturan yang berlaku. Sikap dan perilaku dewan demikianlah yang menyebabkan kredibilitas dan kapabilitas dewan rendah, bahkan sering dituding tidak aspiratif dan akomodatif, mengabaikan dalam menyejahterakan masyarakat. Tugas dan kewajiban dewan di bidang legislasi tidak maksimal dan tidak mencapai target. Di bidang pengawasan juga demikian, apalagi anggaran sering tidak optimal.

Sebetulnya pada pemilu legislatif 2014 ini KPU bekerja ekstra keras, terus memantau dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing Parpol. Agar dalam pembuat laporannya tidak bertolak belakang dengan payung hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD, dan DPRD. Terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan penerimaan sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama. Oleh karena itulah, mengacu pada payung hukum di atas, Parpol sebagai badan publik non pemerintah, wajib melaporkan keuangan/dana kampanye ke KPU Jawa Barat dan bersifat terbuka agar diketahui pula oleh publik. Mengingat keuangan/dana kampanye Parpol itu salah satu sumbernya adalah APBN/APBD. Ini sudah dilakukan, di mana masing-masing parpol telah melaporkannya ke KPU

tanggal 2 Maret 2014. Namun laporan tersebut tampaknya tidak rinci, karena yang dilaporkan besaran dana kampanye itu hanya totalnya saja dan sumbernya hanya satu, yaitu sumbangan dari calegnya saja.

Meskipun banyak kesulitan atau kendala, namun sejalan dengan perkembangan dan kemajuan TIK, maka dalam mengelola dana kampanye pada pemilu legislatif 2014 tampaknya ada sedikit kemudahan dan bisa lebih efektif, yaitu dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis *web* atau *information system campaign fund web based* (ISWB). Dengan cara ini Parpol dituntut untuk melaporkan dan menginformasikan dana kampanye secara obyektif, jujur, dan terbuka.

Teknisnya semua data (penerimaan dan pengeluaran) dana kampanye disimpan/diarsipkan, kemudian diolah dan dianalisis melalui komputer. Setelah menjadi informasi kemudian dipublikasikan melalui internet/*web*. Dengan cara ini sulit untuk memanipulasi dan menutup-nutupi atau *memarkup* data, karena akan diketahui ketika diaudit oleh BPK, selain itu mudah diawasi oleh siapa dan kapan saja, karena mudah diakses di internet.

Di sinilah kelebihan mengelola dana kampanye dengan berbasis *web*, namun cara ini pun tetap bukan merupakan harga mati atau satu-satunya cara terbaik. Sebab masih memerlukan campur tangan pimpinan/elit Parpol dan bahkan harus menjadi bahan pertimbangan dalam kinerja ISWB, yaitu *political will* (kemauan politik) dari pucuk pimpinan Parpol. Kemauan politik ini tidak jarang sebagai langkah mengintervensi atau memengaruhi kinerja ISWB.

Melalui cara kerja ISWB *out come* nya sangat diperlukan sekali karena dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang informasi dana kampanye yang memperlihatkan kejujuran dan keterbukaan (transparansi) yang sekarang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

Kelebihan lainnya adalah bisa menutup peluang atau sulit masuknya dana gelap, dana titipan, dana investasi, dana pinjaman, dan dana ilegal lainnya, walaupun Parpol memerlukan dana kampanye yang besar, karena kegiatan kampanye itu banyak bentuknya. Jelas semua kegiatan politik/kampanye tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan kecil kemungkinan bisa tertutupi kalau hanya mengandalkan dari sumbangan caleg legal saja.

Kelebihan berikutnya, bahwa penerapan sistem informasi dana kampanye Parpol berbasis *web* bukan hanya penyumbang keterbukaan, tapi juga tidak akan menimbulkan saling mencurigai, saling menjelekkan sesama Parpol dan tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Penutup

Seperti pada pemilu legislatif sebelumnya, pengelolaan dana kampanye Parpol tidak dilakukan secara profesional. Pengelolaannya sangat mengecewakan, karena tidak objektif, jujur, dan terbuka (transparan).

Agar tidak terulang lagi pengelolaan dana kampanye seperti di atas, maka pada pemilu legislatif 2014 perlu diterapkan sistem informasi dana kampanye berbasis *web* atau *Information System Campaign Fund Web Based* (ISCFWB). Cara ini lebih managerialistik dan profesional, karena proses penyimpanan, pengolahan, dan

penganalisisan data (penerimaan dan pengeluaran) hingga pemublikasian dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (komputer dan internet). Sehingga menjamin kejujuran, keobjektifan, dan keterbukaan (transparansi), terhindar dari tertutupan.

Kinerja ISCFWB memiliki keefektifan yang tinggi dalam mengelola dana kampanye, sehingga mudah diaudit oleh BPK, mudah diakses dan diawasi oleh masyarakat. Mencerminkan keobjektifan, terhindar dari transaksi yang

mencurigakan. Kemudian dapat menutup peluang masuknya dana kampanye ilegal yang berupa dana titipan, investasi, pinjaman, dan dana ilegal lainnya. Malah sebaliknya akan memotivasi para pimpinan/elit dan pengurus Parpol untuk berbuat jujur dan terbuka. Dengan demikian dapat meningkatkan citra, popularitas, kredibilitas, dan kapabilitas Parpol yang sekarang ini tengah mengalami penurunan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budianto, H. & Farid, H. (2011). *Ilmu Komunikasi : Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Tejoyuwono, N. (1990). *Makalah Seminar Nasional Plantagama*. Fakultas Pertanian UGM.
- Sumantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara*. Bandung: Tarsito.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang :

- UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 10 tahun 2008 tentang Dana Kampanye

Surat Kabar :

-(2014). *Gerindra Miliki Dana kampanye Terbesar*, Galamedia, tanggal 5/3-2014.

TENTANG PENULIS

C.Suprpti Dwi Takariani SH, M.Si, Semarang, 22 September 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Hukum Jurusan Perdata. S2 diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI Bandung). Karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain "*Perilaku Pengguna Internet*", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 13 No. 1 Tahun 2010. Diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. "*Study Eksplanatori Survei Pengaruh Chatting Melalui Facebook Terhadap Komunikasi Tatap Muka Remaja Dalam Keluarga*", Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 14 No. 2 Tahun 2011. Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Tanggapan Masyarakat Penerima Fasilitas Universal Service Obligation (USO) Program Desa Punya Internet. Prosiding Seminar Tahun 2012, Diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Badan Litbang SDM Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung. Pengalaman di bidang penerbitan adalah sebagai ketua dewan redaksi mulai dari tahun 2009 hingga sekarang.

Lucy Pujasari Supratman, M.Si, lahir di Bandung, 17 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Komunikasi, Unpad (2009). Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra di Universitas Pasundan, Fakultas Sastra di Universitas Al-Ghifari serta Fakultas Ilmu Manajemen dan Komunikasi di Institut Manajemen Telkom. Pengajar BIPA/Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (Mahasiswa Luar Negeri yang Berasal dari Turki, Turkmenistan dan Afrika). Penelitian yang pernah dilakukan: *Teaching Method thorough Mnemonic* (Unpas), *Analyzing Metaphor in Maesa Ayu's Novel* (Unpas), dan *Ebonics Language to Indonesian University Students* (Unpad). Karya tulis yang pernah diterbitkan diantaranya: *What's Valentine (Reader's Letter)*, Harian Umum Galamedia, 2007), *Tinjauan Aplikasi Budaya Literasi pada Masyarakat 'SDM' Praliterasi* (Majalah Al-Mizan No.133/2007), *Model Pendidikan Undergraduate: Mengkritisi Pencekalan Kesetaraan HAM pada Kualitas Proses Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia* (Majalah Al-Mizan) dan editor lepas buku berjudul 'Media Penyiaran Televisi' dengan penerbit IMPP-Unpad. Karya-karya fiksinya pernah beberapa kali diterbitkan pula oleh Harian Umum Galamedia.

Drs. Nana Suryana, lahir di Bandung 27 Juli 1955. Menyelesaikan S1 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Fakultas Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Madya di Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pengalaman menulis di Jurnal (Jurnal Penelitian Komunikasi Bandung, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Banjarmasin), Observasi dan Prossiding, Seminar di BPPKI Bandung.

Sapta Sari, S.Sos., M.Si, lahir di Yogyakarta/21 September 1978. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu Sumatera. Menempuh pendidikan S1 hingga selesai pada tahun 2005 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung – Konsentrasi Jurnalistik, S2 diselesaikan pada tahun 2009 di Universitas Padjadjaran Bandung – Konsentrasi Ilmu Komunikasi. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Penulis dan Editor Lepas di Re!Media Service Bandung. Pengalaman menulis: "Aku dan kepribadian Indonesia" Detika Publishing 2007, "Keterampilan Menulis" Sinergi 2008, "Media Siaran TV: Di antara Masyarakat dan Kepemilikan Media " Jurnal Observasi Vol. 8 No.1 Depkominfo Bandung 2010, "Stereotip Bahasa dan Pencitraan Perempuan pada Iklan Kacamata Budaya Populer" Jurnal Observasi Vol. 10 No. 1 Depkominfo Bandung 2012

TENTANG PENULIS

Sri Wahyuningsih, S.Sos.,M.Si, Tuban, 2 Maret 1978, pendidikan formalnya diselesaikan di Univ. Muhammadiyah Malang (S1) bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2001, Univ. Padjadjaran Bandung bidang studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2009. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo, Madura dengan jabatan fungsional Lektor/IIIc Penata Muda. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain adalah Makna Simbol Jilbab Kaum Perempuan diterbitkan dalam Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 6/No. 2/ Februari 2013, Infotainment Komunikasi Ghibah yang Terlarang diterbitkan Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Cholil (Non Akreditasi) Vol. 7/No. 1/ September 2013, Realitas Kejujuran Masyarakat dalam Iklan L.A Light di Televisi versi “Yang lain bersandiwara, Gue Apa Adanya” diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi (Non Akreditasi) Vol VII No. 1

Drs. Syarif Budhirianto, lahir di Bandung, 7 Februari 1962. Pendidikan formal: Sarjana Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Katolik Parahyangan Tahun 1986. Pengalaman pekerjaan : tahun 1987 sampai dengan 1995 Pengajar di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bandung dan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah hingga sekarang. Tahun 1989 sampai sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) RI dan sejak tahun 1994 menjadi fungsional peneliti dengan kepakaran di bidang komunikasi dan media. Karya yang diterbitkan antara lain pengembangan *Jabar cyber provinces* sebagai media informasi dan komunikasi yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Komunikasi (Thn. 2013), Peran *Chief Information Officer* Dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pemerintah Kota Depok (Thn. 2012).

PETUNJUK PENULISAN

Petunjuk Penulisan Naskah Observasi BPPKI Bandung

1. Umum

Observasi merupakan media yang terbit secara berkala dua nomor dalam setahun. Nomor 1 terbit setiap bulan Juni, nomor 2 terbit bulan November. Proses penerbitan nomor 1 berlangsung sejak awal Januari hingga Juni. Proses penerbitan nomor 2 berlangsung sejak Juni hingga November. Sebagai media pengembangan dan rekayasa ilmu yang berasal dari hasil pengamatan lapangan, pengalaman, telaahan, gagasan, tinjauan maupun kritik di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Sasaran khalayak penyebaran ditujukan kepada masyarakat ilmiah, instansi pemerintah dan swasta serta pihak-pihak yang berminat.

Jenis tulisan berupa makalah, hasil kajian pemikiran dan, tinjauan kritis, di bidang komunikasi, informatika, dan media.

Redaksi menerima sumbangan naskah dari kalangan peneliti, akademisi, pengamat dan praktisi komunikasi, media, dan informatika. Naskah yang disumbangkan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Jika di kemudian hari diketahui ada naskah yang dimuat di jurnal atau media lain maka segala risiko menjadi tanggung jawab penulis. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia mengacu pada EYD.

Segala macam bentuk plagiasi menjadi tanggung jawab penulis dan yang bersangkutan tidak dipekenankan untuk mengisi penerbitan di BPPKI Bandung.

Setiap naskah yang masuk akan dikaji dan ditelaah oleh Dewan Redaksi. Naskah yang masuk tidak diterbitkan menjadi hak Redaksi dan tidak dapat diminta kembali. Untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah naskah dimuat, semua naskah yang masuk ke redaksi Observasi akan ditelaah oleh Mitra Bestari sesuai dengan bidang kepakarannya. Untuk menjaga objektivitas maka setiap naskah yang di kirim ke Mitra Bestari dalam kondisi tanpa nama.

Setelah dalam bentuk *proof*, Penulis naskah diminta menandatangani lembar pernyataan persetujuan untuk dicetak menjadi jurnal.

2. Khusus

Format Penulisan:

- Naskah diketik dengan Souvenir Lt BT font 12 di atas kertas A4, spasi ganda melalui program *MS Word 2003/ Open Office Writer*.
- Naskah yang dikirim maksimal 20 halaman. Per halaman rata-rata sekitar 429 kata hingga 450 kata.
- Pengiriman dilakukan melalui *e-mail* (observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id) atau melalui *hard copy* (dilengkapi *soft copy/CDRW*) ke BPPKI Bandung, Jalan Pajajaran no: 88 Bandung – 40173, telp. 022-6017493.
- Naskah mengacu pada sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, *e-mail*); Abstrak; Kata kunci; Pendahuluan; Pembahasan; Penutup.

PETUNJUK PENULISAN

Penjelasan format penulisan:

Judul: Ditulis dengan singkat, padat, maksimal 10 sampai 12 kata (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris). Isinya mencerminkan masalah pokok. Ditulis dengan huruf kapital font 14. Hindari judul penelitian dengan menggunakan kata-kata “Telaah”, “Studi”, “Pengaruh”, “Analisis”, dan sejenisnya. Hindari penggunaan kata kerja dan singkatan.

Nama Penulis (termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, e-mail, tgl kirim naskah):

Contoh:

Muhammad Zein Abdullah, S.Ip, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Komunikasi, Universitas Haluoleo Kendari
Sulawesi Tenggara - 93232

Telp/Fax/HP (0401) 3192511, 081341877133, *e-mail:zein_unhalu@yahoo.co.id*

Naskah dikirim pada tanggal 7 Januari 2011

Abstrak: Ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, maksimal 200 kata tanpa paragraph. Isinya harus mencerminkan latar belakang dan permasalahan, pembahasan dan implikasi. Abstrak bukan merupakan turunan dari pendahuluan.

Kata Kunci: Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris di bawah abstrak. Terdiri atas 3 sampai 5 kata. Tidak harus kata tunggal, boleh kata majemuk. Ditulis dengan huruf kecil format miring (*Italic*). Bukan kata yang bersifat Umum. Contoh judul: Membangun Format Kemitraan Media Dalam Rangka Diseminasi Informasi. **Kata-kata kunci:** Kemitraan, Media, Diseminasi Informasi.

Pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah; pentingnya permasalahan tersebut untuk ditelaah lebih jauh;

Kerangka konsep/analisis: perspektif pemikiran/tinjauan, bingkai analitik yang digunakan.

Pembahasan: Secara substansial isinya mencakup telaahan terhadap permasalahan dengan bingkai analitik yang digunakan. Jika menggunakan tabel, maka bentuk tabel, hendaknya menggunakan tiga garis horisontal dan tidak menggunakan garis vertikal, tabel menggunakan nomor sesuai dengan urutan penyajian (Tabel 1 , dst), judul tabel diletakan di atas tabel dengan posisi di tengah (*centre justified*) contoh :

Tabel 1

Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin	Frekuensi
1. Laki-laki	25
2. Perempuan	25
Jumlah :	50

PETUNJUK PENULISAN

Sumber :

Penutup: isinya mencakup simpulan dan saran.

Cara pengutipan : menggunakan pola *bodynote*, yakni menuliskan nama belakang penulis buku yang dijadikan sumber dan tahun terbit buku tanpa disertai halaman.

Sumber bacaan hendaknya terdiri dari minimal 60% yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir ini, dan 40% bebas.

Tidak diperbolehkan menggunakan sumber dari wikipedia, blog yang kredibilitasnya kurang.

Daftar Pustaka: Daftar pustaka ditulis mengacu pada *Standard Harvard*.

Contoh:

1. Buku (satu penulis):

Berkman, R.I (1994) *Find It Fast: how to uncover expert Information on any subject*. New York: Harper Perennial.

2. Buku (dua penulis/lebih):

Moir, A. & Jessel, D. (1991) *Brain sex: the real difference between men and women*. London: Mandarin.

Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Waish, L. (1995) *Finding out: Information Literacy for the 21st century*. South Melbourne: MacMillan Education Australia.

3. Editor atau Penyusun sebagai penulis:

Spence, B. ed. (1993) *Secondary School Management in the 1990s: Challenge and Change*. Aspects of Education Series, 48. London: Independent Publishers.

Robinson, W.F & Huxtable, C.R.R. eds. (1998) *Clinicopathologic principles for veterinary medicine*. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Penulis dan Editor:

Breediove, G.K. & Schorfheide, A.M. (2001) *Adolescent pregnancy*. 2nd ed. Wleczorek, R.R. ed. White Plains (NY): March of Dimes Education Services.

5. Institusi, Perusahaan, Atau Organisasi sebagai penulis

UNESCO (1993) *General Information Programme and UNISIST*. Paris: Unesco, PGI-93/WS/22

6. Salah satu tulisan dalam buku kumpulan tulisan:

Porter, M.A. (1993) The Modification of Method in Researching Postgraduate Education. In: Burgess, R.G.ed. *The Research Process in Educational Setting: Ten case studies*. London: Falmer Press, pp. 35-47

7. Referensi kedua (buku disitasi dalam buku yang lain):

Confederation of British Industry (1989) *Towards a skills revolution: a youth charter*. London: CBI. Quoted In: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. (1994) *Information skills In Academic libraries: a teaching and learning role in*

PETUNJUK PENULISAN

- higher education*. SEDA Paper 82. Birmingham: Staff and Educational Development Association, p.39
8. Prosiding Seminar Atau Pertemuan:
ERGOB Convergence on Sugar Substitutes, 1978. Geneva, (1979). *Health and sugar substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar substitutes*, Guggenheim, B, ed. London: Basel.
 9. Naskah yang dipresentasikan dalam seminar atau pertemuan:
Romonav, A.P. & Petroussenko, T.V. (2001) International book exchange: has it any future in the electronic age? In: Neven, J, ed. *Proceedings of the 67th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001, Boston USA*. The Hague, International Federation of Library Association and Institutions, pp. 80-8.
 10. Naskah seminar atau pertemuan yang tidak dikumpulkan dalam suatu prosiding:
Lanktree, C. & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). *Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA*.
Haryo, T.S. & Istiadjud, M. (1999, September). Beberapa faktor etologi meningokel nasofrontal. *Naskah dipresentasikan dalam konggres MABI*, Jakarta.
 11. Sumber referensi yang berasal dari makalah pertemuan berupa poster:
Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June), Beyond redlining: Editing software that works. *Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing*, Washington, DC.
 12. Ensiklopedia:
Hibbard, J.D., Kotler, P. & Hitchens, K.A. (1997) Marketing and merchandising, in: *The new Encyclopedia Britannica*, vol. 23, 15th revised ed. London: Encyclopedia Britannica.
 13. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak pemberi dana/sponsor:
Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.
 14. Laporan Ilmiah atau Laporan Teknis diterbitkan oleh pihak Penyelenggara:
Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). *Health monitoring on vibration signatures. Final Report*. Arlington (VA): Air Force Office of AFRL.SRBLTR020123. Contract No.: F4962098100049.
 15. Tesis atau Disertasi:
Page, S. (1999) *Information technology impact: a survey of leading UK companies*. MPhil. Thesis, Leeds Metropolitan University.
Istiadjud, M. (2004) *Korelasi defisiensi asam folat dengan kadar transforming growth factor- β 1 dan insulin-like growth factor I dalam serum induk dan tulang kepala janin tikus*. Disertasi, Universitas Airlangga.

PETUNJUK PENULISAN

16. Paten:
Phillip Morris Inc. (1981) *Optical perforating apparatus and system*. European patent application 0021165A1.1981-01-07.
17. Artikel Jurnal:
Bennett, H., Gunter, H. & Reld, S. (1996) Through a glass darkly: images of appraisal. *Journal of Teacher Development*, 5 (3) October, pp. 39-46.
18. Artikel Organisasi atau Institusi sebagai Penulis:
Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension, Insulin, and proinsulin in participants with Impaired glucose tolerance. *Hypertension*, 40 (5), pp. 679-86.
19. Artikel tidak ada nama penulis:
How dangerous is obesity? (1977) *British Medical Journal*, No. 6069, 28 April, p.1115.
20. Artikel nama orang dan Organisasi sebagai penulis:
Vallancien, G., Emberton, M. & Van Moorselaar, R.J; Alf-One Study Group. (2003) Sexual dysfunction In d, 274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. *JUrol*, 169 (6), pp. 2257-61.
21. Artikel volume dengan suplemen:
Geraud, G., Spierings, E.L., & Keywood, C. (2002) Tolerability and safety of frovatriptan with short-and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. *Headache*, 42 Suppl 2, S93-9.
22. Artikel volume dengan bagian:
Abend, S.M. & Kulish, N. (2002) The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. *Int J Psychoanal*, 83 (Pt 2), pp.491-5.
23. Artikel Koran:
Sadil, M. (2005) Akan timbul krisis atau resesi?. *Kompas*, 9 November, hal. 6.
24. Artikel Audio-visual (Film 35mm, Program Televisi, Rekaman, Siaran Radio, Video Casette, VCD, DVD):
Now voyager. (Film 35mm). (1942) Directed by Irving Rapper, New York: Warner.
Now wash your hands.(videocassette). (1996). Southampton: University of Southampton, Teaching Support & Media Services.
25. Naskah-naskah yang tidak dipublikasikan:
Tian, D., Araki, H., Stahl, E, Bergelson, J., & Kreitman, M. (2002) *Signature of balancing selection in Arabidopsis*.Proc Nati Acad Sci USA. In press.
26. Naskah-naskah dalam media Elektronik (Buku-buku Elektronik / e-books):
Dronke, P. (1968) *Medieval Latin and the rise of European love-lyric* [internet]. Oxford University Press. Aavailable from: netLibrary
<<http://www.netLibrary.com/urlapl.asp?action=summary&v=1&bookid=22981>> [Accessed 6 March 2001].
27. Artikel Jurnal Elektronik:

PETUNJUK PENULISAN

- Cotter, J. (1999) Asset revelations and debt contracting. *Abacus* [internet], October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: <<http://www.ingenta.com>> [Accessed 19 November 2001].
28. Artikel dalam web pages:
Rowett, S. (1998) Higher Education for capability: autonomous learning for life and work [internet], Higher Education for Capability. Available from: <<http://www.lie.mdx.ac.uk/hec/about.htm>> [Accessed 8 August 2000].
29. Artikel dalam website:
Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. (2005) *Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM* [internet]. Yogyakarta: S2 IKM UGM. Tersedia dalam: <<http://ph-ugm.org>> [diakses 8 November 2005].
30. Artikel dalam CD-ROM:
Picardle, J. (1998) I can never say goodbye. *The observer* [CD-ROM], 20 September, 1, Available from: The Guardian and Observer an CD-ROM. [Accessed 16 June 2000].
31. Artikel dalam Database Komputer:
Gray, J.M. & Courtenay, G. (1988) *Youth cohort study* [computer file]. Colchester: ESRC Data Archive (Distributor).
32. Artikel online images (informasi visual, foto, dan ilustrasi):
Hubble space telescope release In the space shuttle's payload bay. (1997) [Online Image]. <Available from: <http://explorer.arc.nasa.gov/pub/>> SPACE/GIF/s31-04-015.glf, [Accessed 6 July 1997].
33. Artikel dalam e-mail:
Lawrence, S. (slawrence.goyh@go-regions.gsi.gov.uk), 6 July 2001. *Re:government office for Yorkshire and Humberside Information*. Email to F.Burton (f.burton@leedsmet.ac.uk).

Media dan Pemilu Presiden Tahun 2014

Tahun ini Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, setelah sebelumnya didahului dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini akan menentukan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Peran media dalam menyukseskan pemilu presiden tahun 2014 akan sangat menentukan dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Observasi mengundang para pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menulis sesuai topik di atas. Naskah bisa berupa resume laporan hasil penelitian, opini, telaahan teoritis, atau hasil pengamatan. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dilengkapi dengan abstrak dengan jumlah 100-150 kata. Diketik dengan menggunakan program MS Word 2003/Open Office dengan spasi 1,5 di atas kertas A4, panjang naskah antara 10-20 halaman, dilengkapi biodata penulis. Naskah harus asli dan belum pernah dipublikasikan media lain. Kutipan ditulis dengan sistem *endnotes*. Naskah dikirim dalam bentuk *hard copy* beserta *soft copy* ke alamat redaksi Observasi: Jl. Pajajaran No. 88 Bandung atau melalui *email*: observasi.bppki.bandung@mail.kominfo.go.id